

# Orkestrasi Kolaboratif Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sosial-Ekologis di Kabupaten Pringsewu

Ulfa Umayasari<sup>1\*</sup>, Goestyari Kurnia Amantha<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Universitas Lampung

\*Korespondensi Email : ulfaumayasari@fisip.unila.ac.id

## Abstract

*This research aims to address the coordination and synergy gap between the government, academics, and the community in managing socio-ecological issues in Pringsewu Regency. The development approach has been sectoral and top-down, making policies less effective in addressing the complexity of local problems. The long-term goal is to create a sustainable collaboration model to realize socio-ecological sustainability based on the orchestration of local actors. This study uses a qualitative approach with case study methods, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). The results indicate that the existing governance is hierarchical, with the government as the dominant actor, while the roles of academics and the community are not yet systematically institutionalized. This creates coordination gaps and resistance to the principles of Collaborative Governance. The expected result is the formulation of a collaborative orchestration model – based on Quadruple Helix and Governance Network theories – that can serve as a reference for sustainable development policies. The research targets a Technology Readiness Level (TRL) of 1-3, focusing on concept and model validation in a relevant environment.*

**Keywords:** *Collaboration, Socio-Ecological Sustainability, Orchestration, Governance, Pringsewu.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan koordinasi dan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan isu-isu sosial-ekologis di Kabupaten Pringsewu. Selama ini, pendekatan pembangunan cenderung sektoral dan *top-down*, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang efektif dalam menjawab kompleksitas permasalahan di tingkat lokal. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menciptakan model kolaborasi berkelanjutan yang mampu mewujudkan keberlanjutan sosial-ekologis berbasis orkestrasi aktor-aktor lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, dan *focus group discussion (FGD)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang ada bersifat hierarkis dengan pemerintah sebagai aktor dominan, sementara peran akademisi dan masyarakat belum terlembaga secara sistematis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan koordinasi dan resistensi terhadap prinsip *Collaborative Governance*. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya model orkestrasi kolaboratif – berbasis teori *Quadruple Helix* dan *Governance Network* – yang mampu menjadi referensi bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menargetkan Tingkat

Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada level 1-3, yaitu validasi konsep dan model dalam lingkungan yang relevan.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Keberlanjutan Sosial-Ekologis, Orkestrasi, Tata Kelola, Pringsewu.

## Pendahuluan

Kabupaten Pringsewu, sebagai wilayah agraris dan semi-perkotaan, dihadapkan pada tantangan besar dalam menyeimbangkan antara laju pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan sosial-ekologis. Permasalahan nyata seperti alih fungsi lahan pertanian yang mengancam status ketahanan pangan, serta pengelolaan sampah rumah tangga yang belum optimal, menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan komprehensif. Pendekatan tata kelola lingkungan yang selama ini diterapkan cenderung bersifat sektoral dan *top-down*, di mana pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bertindak sebagai aktor dominan, sementara pemangku kepentingan lainnya berada di posisi perifer.

*State of the art* dalam studi tata kelola modern menekankan pergeseran dari model hierarkis menuju model jejaring yang kolaboratif. Kerangka kerja seperti *Quadruple Helix* (Carayannis & Campbell, 2009) dan *Governance Network* (Klijn et al., 2025) menawarkan lensa untuk memahami bagaimana interaksi sinergis antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media/komunitas dapat mendorong inovasi sosial. Namun, penelitian terdahulu di konteks Indonesia (misalnya, Suwandi et al., 2023) menunjukkan bahwa implementasi model-model ini seringkali terhambat oleh lemahnya mekanisme orkestrasi yang mampu mengikat para aktor dalam sebuah kerangka kerja yang berkelanjutan.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pengembangan model orkestrasi kolaboratif yang mengintegrasikan kedua kerangka teori tersebut dalam konteks kabupaten semi-perkotaan. Penelitian ini mengisi kesenjangan teoretis dan praktis dengan tidak hanya memetakan aktor, tetapi juga merancang mekanisme formal untuk melembagakan kolaborasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk relasi dan pola interaksi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam tata kelola sosial-ekologis di Kabupaten Pringsewu, bagaimana mekanisme *power sharing* dan *trust building* dapat diorkestrasi untuk memperkuat kolaborasi multi-aktor, serta bagaimana model orkestrasi kolaboratif yang sesuai dengan karakteristik lokal dapat dirancang sebagai referensi kebijakan berkelanjutan.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menggali secara mendalam dinamika relasi, makna, dan konteks sosial yang melingkupi interaksi antar aktor di Kabupaten Pringsewu. Subjek penelitian (objek) adalah tiga pilar utama kolaborasi: Pemerintah (diwakili oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup), Akademisi (diwakili oleh dosen/peneliti dari perguruan tinggi lokal), dan Masyarakat (diwakili oleh tokoh

masyarakat dan pengelola TPS3R). Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* untuk memastikan representasi dari setiap heliks.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode untuk menjaga validitas temuan:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan informan kunci untuk memahami perspektif, peran, hambatan, dan harapan dari masing-masing aktor.
2. Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen kebijakan relevan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan kegiatan DLH, dan riset terdahulu untuk memahami kerangka kerja formal yang ada.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang meliputi proses kodifikasi data, identifikasi tema-tema dominan terkait pola interaksi dan hambatan kolaborasi, serta interpretasi untuk membangun sebuah model konseptual. Penelitian ini ditargetkan mencapai TKT 3, yaitu tahap pembuktian konsep (*proof of concept*), di mana model teoritis telah dibangun dan divalidasi secara awal melalui data empiris yang kaya.

## Hasil dan Diskusi

### Dinamika Tata Kelola Hierarkis dan Sektoral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sosial-ekologis di Kabupaten Pringsewu masih sangat didominasi oleh pendekatan hierarkis yang dijalankan oleh DLH. Program-program yang ada, seperti pengendalian sampah dan rehabilitasi lahan, cenderung bersifat sektoral, berorientasi pada capaian administratif (serapan anggaran), dan minim ruang partisipasi publik yang substantif. Kebijakan yang dihasilkan bersifat top-down, memposisikan aktor non-pemerintah sebagai objek atau pelaksana teknis, bukan mitra setara. Isu-isu utama seperti pengelolaan sampah – di mana dari potensi 74.621 meter kubik baru terkelola 45,56% – dan alih fungsi lahan pertanian masif yang mengancam status lumbung pangan provinsi, belum ditangani melalui sebuah kerangka kerja multi-aktor yang terintegrasi.

### Pemetaan Peran Aktor: Triple Helix yang Terbatas

Diskusi lebih lanjut mengenai pemetaan peran aktor menunjukkan adanya relasi dalam kerangka Triple Helix yang sangat terbatas dan belum terorkestrasi:

- Pemerintah (DLH): Berperan sebagai regulator dan administrator. Namun, dalam praktiknya cenderung reaktif, menunggu "jempitan" untuk berkolaborasi, dan lebih fokus pada sosialisasi satu arah daripada membangun forum interaktif.
- Akademisi: Keterlibatan perguruan tinggi bersifat insidental, sporadis, dan tidak memiliki keberlanjutan formal. Belum ada rekomendasi kebijakan berbasis riset yang diadopsi secara sistematis, menciptakan kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*).
- Masyarakat: Partisipasi masyarakat, misalnya melalui TPS3R, masih minim dan didominasi oleh insentif teknis, belum bertransformasi menjadi kepemilikan kolektif atas isu keberlanjutan.
- Sektor Swasta/Media (Heliks Keempat): Keterlibatan sektor swasta dan media dalam isu sosial-ekologis spesifik di Pringsewu masih sangat terbatas dan belum

terintegrasi, sehingga analisis difokuskan pada tiga aktor lainnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan koordinasi yang berakar pada pendekatan sektoral-administratif pemerintah, yang secara teoritis merupakan resistensi terhadap prinsip-prinsip inti *Collaborative Governance* seperti kekuasaan bersama (*shared power*) dan pencarian fakta bersama (*joint fact-finding*) (Ansell & Gash, 2008). Berdasarkan temuan tersebut, dirancang sebuah model orkestrasi untuk mentransformasi peran pasif menjadi peran aktif yang terstruktur.

**Tabel 1.** Model Orkestrasi Peran Aktor Kolaboratif

Aktor	Peran Eksisting (Pasif)	Peran Baru (Diorkestrasi)	Mekanisme Kolaborasi Formal
Pemerintah (DLH)	Administrator, Sosialisasi, Reaktif	Orkestrator Aktif, <i>Fact-Finder</i> Bersama	Forum Kolaborasi IKLH Pringsewu (FKIP)
Akademisi	Insidental (Riset mandiri)	Mitra Strategis, Penyedia Rekomendasi Formal	Unit Riset Bersama/MoU Terstruktur
Masyarakat	Partisipasi Minim, Penerima Bantuan	Mitra Pengelola Aktif, Pemilik Saham Sosial	Transformasi TPS3R menjadi BUMDes Kolaboratif
Media/Komunitas	Tidak Terlibat Formal	Agen Kampanye, Penghubung Akar Rumput	Program Kampung Iklim Kolaboratif

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

### Dinamika Power Sharing dan Trust Building antaraktor

Temuan menunjukkan bahwa hubungan antaraktor di Kabupaten Pringsewu masih bersifat asimetris. Pemerintah memegang posisi dominan dalam pengambilan keputusan, sementara akademisi dan masyarakat cenderung berperan sebagai penerima kebijakan. Model *power sharing* belum terwujud secara seimbang, karena tidak ada mekanisme formal yang mengatur porsi kewenangan dan tanggung jawab bersama.

Dari sisi *trust building*, ketidakpercayaan muncul akibat pengalaman kolaborasi sebelumnya yang bersifat proyek jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Akademisi sering merasa hasil risetnya tidak ditindaklanjuti, sementara masyarakat menilai pemerintah lebih berorientasi pada kepatuhan administratif daripada solusi nyata. Rendahnya kepercayaan ini menghambat proses *joint fact-finding* dan pembelajaran bersama yang menjadi inti *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008).

Upaya orkestrasi perlu diarahkan untuk membangun **power symmetry** melalui: (1) pelembagaan forum bersama yang memberi hak suara setara bagi seluruh aktor; (2) penggunaan *knowledge-based authority* dari akademisi untuk menyeimbangkan kekuasaan regulatif pemerintah; dan (3) penguatan kapasitas masyarakat melalui insentif sosial dan ekonomi agar mereka menjadi aktor pengelola, bukan sekadar pelaksana.

Kepercayaan dapat ditumbuhkan melalui mekanisme *iterative collaboration* – yakni kolaborasi berulang dengan evaluasi bersama. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menjamin transparansi informasi, sementara akademisi menjadi penjamin validitas data. Masyarakat, dengan pengalaman lokalnya, berkontribusi dalam tahap perencanaan dan monitoring. Dengan demikian, proses kolaborasi tidak lagi bergantung pada struktur formal, melainkan terbangun atas dasar saling percaya dan saling menguatkan.

#### Model Orkestrasi Kolaboratif sebagai Solusi

Model ini mengusulkan tiga pilar implementasi utama untuk mengoperasionalkan transisi menuju tata kelola kolaboratif:

1. Pelembagaan Platform Interaksi: Mengatasi hambatan deliberasi dengan membentuk "Forum Kolaborasi IKLH Pringsewu (FKIP)". Forum ini harus didukung mandat formal (misalnya, Peraturan Bupati) agar pemerintah memiliki wewenang untuk memimpin dan memastikan kehadiran lintas dinas. Forum ini mengubah model sosialisasi satu arah menjadi dialog kebijakan yang intensif.
2. Orkestrasi Sumber Daya Pengetahuan: Mengatasi *knowledge gap* dengan memformalkan MoU/MoA yang mengikat Perguruan Tinggi untuk menyalurkan riset dan pengabdianya secara terstruktur sesuai kebutuhan daerah. Luaran riset wajib berbentuk rekomendasi formal (*policy brief*), mengubah status akademisi dari "undangan insidental" menjadi mitra pembuat keputusan.
3. Orkestrasi Keberlanjutan Sosial-Ekologis: Mengatasi partisipasi pasif dengan mentransformasi kelembagaan TPS3R menjadi unit usaha mandiri (BLU/BUMDes Kolaboratif) yang berbasis insentif dan keuntungan sosial. Pemerintah berperan sebagai orkestrator yang memfasilitasi integrasi masyarakat dengan regulasi (insentif) dan inovasi (riset akademisi).

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola sosial-ekologis di Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh pendekatan hierarkis dan sektoral, yang membatasi efektivitas kolaborasi antaraktor. Melalui pendekatan orkestrasi kolaboratif, peran pemerintah dapat ditransformasikan dari administrator menjadi **orkestrator aktif**, yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menyeimbangkan kekuasaan antaraktor (*power sharing*) serta membangun kepercayaan jangka panjang (*trust building*).

#### Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memperluas teori *Collaborative Governance* dengan menambahkan dimensi orkestrasi yang menekankan keseimbangan kekuasaan dan kepercayaan antaraktor sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi. Model ini juga memperkuat konsep *Quadruple Helix* dengan menempatkan orkestrasi sebagai mekanisme institusional yang menghubungkan heliks-heliks secara adaptif di tingkat lokal.

#### Implikasi Kebijakan

Pemerintah daerah perlu membentuk platform resmi seperti *Forum Kolaborasi IKLH Pringsewu* yang diatur melalui Peraturan Bupati untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi. Akademisi harus diintegrasikan secara sistematis melalui *MoU/MoA riset kebijakan daerah*, sementara masyarakat perlu diberdayakan melalui transformasi kelembagaan TPS3R menjadi unit usaha sosial yang mandiri. Dengan demikian, model

ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam membangun tata kelola sosial-ekologis yang kolaboratif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPPM) Universitas Lampung atas dukungannya dalam memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini, baik melalui pendanaan, koordinasi administratif, maupun pendampingan akademik yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan penelitian ini.

### Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Budiati, Y., & Firmansyah, A. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(2), 123-137.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). "Mode 3" and "Quadruple Helix": Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3-4), 201-234.
- Haryono, N., Rahayu, A. Y. S., & Soeling, P. D. (2024). Systemic leadership in sustainable collaborative governance: A case study of urban green space management in Surabaya. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 37(3), 329- 346.
- Klijn, E. H., Koppenjan, J., Spekkink, W., & Warsen, R. (2025). GOVERNANCE NETWORKS IN THE PUBLIC SECTOR. In *Networked Governance: New Research Perspectives* (2nd ed.).
- Maulana, R. R., Suwaryo, U., & Van Ylst, F. (2023). Collaborative governance in the management and protection of the Batanghari River Basin in Jambi Province. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 105-128.
- Suwandi, A., Purwaningsih, E., & Wibowo, A. (2023). Integrasi Quadruple Helix dalam Inovasi Lingkungan di Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 45-60.